

PERANAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KALUPPINI KECAMATAN ENREKAN KABUPATEN ENREKANG

The Role of Village Funds in Improving the Community Economy in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency

Magvira Ramadani¹ Darmawan²,

Email : _____

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulsel

Abstrak

MAGVIRA RAMADANI, 2024, dengan judul penelitian "Peranan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang". Penelitian ini dilakukan di Desa kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pembimbing I Darmawan dan pembimbing II Nurwani. Skripsi Program Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi dana desa untuk memperkuat ekonomi Masyarakat local di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu kepala Desa Kaluppini, Sekretaris Desa, bendahara desa serta masyarakat desa kaluppini. Berdasarkan hasil penelitian yang ada bahwa peranan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terdapat beberapa indikator yaitu infrastruktur, pemberdayaan Masyarakat, partisipasi Masyarakat, kesejahteraan social, ekonomi, dan pendidikan. Indikator ini memberikan hasil bahwa peranan dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di desa sudah cukup maksimal dan harus terus ditingkatkan. Adapun beberapa kendala yaitu sumber daya Masyarakat apabila SDM kurang bekerja sama maka dapat menghambat pekerjaannya, terkadang lambatnya pencairan dana desa dan kurangnya pemahaman tentang keterampilan manajemen keuangan dan faktor pendukung yaitu partisipasi Masyarakat sangat baik dalam Pembangunan desa dan juga sarana prasarana sebagai penunjang dalam Pembangunan desa.

Kata Kunci : Peranan, Dana Desa, Peningkatan Ekonomi

Abstract

MAGVIRA RAMADANI, 2024, with the research title "The Role of Village Funds in Improving the Community Economy in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency". This research was conducted in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency. Supervisor I Darmawan and supervisor II Nurwani. Regional Financial Accounting Program Thesis, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR). The aim of this research is to determine the role of village funds in improving the economy of the community in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency and to determine the obstacles faced in implementing village funds to strengthen the economy of local communities in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency. The research method used in this research is a qualitative descriptive method and data collection techniques through observation and interviews. The informants in this research were 7 people, namely the head of Kaluppini Village, Enrekang Regency, the Village Secretary, the village treasurer and the Kaluppini village community. Based on the results of existing research, there are several indicators for the role of village funds in improving the community economy, namely

infrastructure, community empowerment, community participation, social welfare, economics and education. This indicator shows that the role of village funds in improving the economy of the community in the village has been maximized and must continue to be improved. There are several obstacles, namely community resources, if human resources do not cooperate enough, it can hinder their work, sometimes the disbursement of village funds is slow and there is a lack of understanding of financial management skills and supporting factors, namely very good community participation in village development and also infrastructure to support village development.

Keywords: Role, Village Funds, Economic Improvement.

PENDAHULUAN

Kemiskinan sering terjadi di Negara berkembang sebagaimana kita bangsa Indonesia salah satunya. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi program prioritas dalam pemerintahan. Menurut world bank kemiskinan adalah hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar per hari. Kemiskinan sering terjadi di pedesaan (12.869) daripada perkotaan (6,697)¹, rendahnya pendidikan menyebabkan penurunan dalam segi sumberdaya manusia, serta kurangnya akses terhadap ruang publik menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mendompleng dan menggerakkan ataupun membangun ekonomi pedesaan agar terentah dari kemiskinan. Antara lain melalui pemberian bantuan Raskin (beras miskin), PNPM, Dana BOS dan BLSM akan tetapi beberapa upaya ini dinilai kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan maka Presiden Joko Widodo memasukkan program membangun desa dari pinggiran ke dalam salah satu program Nawacita dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Hal ini didukung UU Republik Indonesia No. 6 (2014) mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis Permendes No 6 (2018). Demi mewujudkan cita-cita bangsa maka di bangunlah ekonomi yang bersifat Inklusif dan berbasis kerakyatan. Dana desa merupakan program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang dijalankan mulai dari awal beliau menjabat atau dilantik hingga saat ini. Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari dibidang ekonomi dengan memberdayakan sumber daya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh sebab itu Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam pengembangan suatu organisasi. Sebuah organisasi akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia di organisasi tersebut. Di dalam organisasi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mempunyai ketrampilan serta berdaya saing yang tinggi merupakan faktor penting di dalam persaingan global. Sumber Daya Manusia merupakan subjek yang aktif dan menentukan, bukan objek yang pasif dan ditentukan sebagaimana kedua psikis yang dimilikinya Sumber Daya Manusia melakukan berbagai kegiatan, yang salah satu diantaranya disebut erja sebagai usaha mewujudkan eksistensi organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Namun, masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang mendapatkan

penanganan yang khusus terutama bagi SDM yang tidak siap menghadapi persaingan global dan majunya teknologi. Hal tersebut mengakibatkan Kinerja organisasi menjadi terhambat dikarenakan Kinerja dari SDM tersebut juga mengalami hambatan-hambatan.

Menurut Undang Undang RI No. 23 (2014) Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu wilayah otonom untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan penduduk setempat (Kambey et al., 2021)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun ke depan konsisten di bawah potensinya. Pertumbuhan dengan tingkat menengah itu tidak cukup menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintahan desa harus selalu memantau masyarakat. Potensi sumber daya yang ada di desa perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Tenaga kerja yang produktif perlu dibimbing agar bisa memiliki penghasilan yang meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak seperti dalam segmen agraris, sosialisasi barang serta jasa namun atau mungkin berbagai aktivitas yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh anggota masyarakat agar dapat lebih mandiri pasti bebas dari belenggu dasar yang membuat hidup sengsara. Sedangkan, pembangunan juga harus dikoordinasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunan desa yang cakupannya sangat luas dapat tercapai.

Pembangunan pedesaan ataupun desa bisadikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan geologis fisik, aset karakteristik atau aset manusia. Bagaimanapun, itu mengandung kemungkinan finansial yang harus dikenali dan dikembangkan. Perubahan-perubahan yang mengakhiri era pemerintahan orde baru di bawah telah membawa perubahan yang sangat kritis dalam tata kehidupan bernegara. Berbagai isu yang akhirnya menjadi perdebatan umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang hingga saat ini terjebak dalam berbagai sudut pandang yang secara tegas diatur oleh sudut pandang finansial dan politik. Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan.

Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten, di mana bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana desa diberikan kepada setiap desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing.

Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Akuntabilitas tidak hanya berarti

mematuhi hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga menarik untuk dikaji, karena jika prinsip akuntabilitas tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan penyelewengan dana desa. Sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki peluang yang sangat baik untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan (Amanda, 2021).

Dalam pasal 4 Permendes RI No 21 (2015) disebutkan bahwa dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dana desa adalah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di lokal desa, di bidang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan desa. Program pembangunan fisik desa berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, kewirausahaan masyarakat mandiri, sarana dan prasarana produksi dan distribusi, energi terbarukan, pelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat antara lain berupa kegiatan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa diambil dari 10 % dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Keuangan RI, 2022)

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, Kementerian Desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi desa untuk membantu penyelesaian persoalan desa dan percepatan pembangunan. Melalui Indeks Desa Membangun, diharapkan memudahkan desa dan semua komponen yang terlibat untuk mengetahui persoalan desa berdasarkan penghitung indikator yang kemudian dapat di break down menjadi program unggulan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi dengan judul "Peranan dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa kaluppini, Kecamatan enrekang, Kabupaten enrekang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang. Lokasi penelitian mencakup Kantor Desa Kaluppini dan Dusun Kajao Desa Kaluppini, dengan fokus pada empat aspek utama: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan metode reduksi data.

Informan dalam penelitian ini mencakup Kepala Desa sebagai informan kunci, dua pegawai desa (Sekretaris dan Bendahara) sebagai informan utama, dan empat warga sekitar sebagai informan tambahan. Data yang dikumpulkan dibagi menjadi data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memastikan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN

1. Peranan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kaluppini, Kecamatan Kaluppini, Kabupaten Enrekang

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Kaluppini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kaluppini, berikut adalah jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima dari tahun 2021 hingga 2023:

Tabel 1,
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini
Tahun Anggaran 2021

No	Bidang	Anggaran Tahun 2021 (Rp)
1	Penyelenggaraan Desa	509.955.820
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	884.940.140
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	89.409.806
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42.500.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	326.812.000
6	Pembiayaan	79.546.960
Total		1.853.617.766

Pada Tahun Anggaran 2021, Dana Desa Kaluppini sebesar Rp1.853.617.766 dialokasikan ke beberapa bidang prioritas, dengan fokus utama pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang mendapat alokasi terbesar sebesar Rp884.940.140, diikuti oleh Penyelenggaraan Desa sebesar Rp509.955.820. Selain itu, Bidang Penanggulangan Bencana menerima Rp326.812.000 untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, sementara Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat masing-masing memperoleh Rp89.409.806 dan Rp42.500.000. Sisa anggaran sebesar Rp79.546.960 dialokasikan untuk Pembiayaan, mencakup biaya administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi ini mencerminkan prioritas desa dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, serta kesiapsiagaan bencana.

Tabel 2
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini
Tahun Anggaran 2021

No	Bidang	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
1	Penyelenggaraan Desa	477.220.691
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	514.689.080
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27.178.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	171.232.920
5	Bidang Penanggulangan Bencana	320.400.000
6	Pembiayaan	212.118.442

No	Bidang	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Total		1.510.721.691

Pada Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran Dana Desa Kaluppini dirinci dalam beberapa bidang prioritas dengan total anggaran sebesar Rp1.510.721.691. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan jumlah Rp514.689.080, menunjukkan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Bidang Penanggulangan Bencana juga mendapatkan porsi signifikan sebesar Rp320.400.000, yang menunjukkan perhatian pada kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Sementara itu, Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperoleh anggaran sebesar Rp171.232.920 untuk program yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Bidang Penyelenggaraan Desa dan Pembiayaan masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp477.220.691 dan Rp212.118.442, untuk mendukung administrasi dan operasional desa. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp27.178.000, mendapatkan alokasi yang lebih kecil, mencerminkan prioritas yang relatif lebih rendah dalam hal pembinaan masyarakat dibandingkan dengan bidang lainnya.

Tabel 3
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini
Tahun Anggaran 2021

No	Bidang	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1	Penyelenggaraan Desa	516.940.488,95
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	693.771.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	22.578.333
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	173.613.647
5	Bidang Penanggulangan Bencana	112.312.241
6	Pembiayaan	232.271.514,54
Total		1.519.215.377

Tabel 3 menunjukkan alokasi anggaran Dana Desa Kaluppini untuk tahun anggaran 2021. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.519.215.377 terbagi ke dalam berbagai bidang. Bidang penyelenggaraan desa mendapatkan anggaran terbesar, yaitu Rp516.940.488,95, diikuti oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran sebesar Rp693.771.000. Bidang pembinaan kemasyarakatan memperoleh anggaran sebesar Rp22.578.333, sementara bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan Rp173.613.647. Bidang penanggulangan bencana menerima anggaran sebesar Rp112.312.241, dan sisanya sebesar Rp232.271.514,54 dialokasikan untuk pembiayaan. Pembagian anggaran ini mencerminkan prioritas dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan berbagai aspek kehidupan desa, dengan fokus utama pada pembangunan dan penyelenggaraan desa.

PEMBAHASAN

1. Peranan dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat

Anggaran Dana Desa Kaluppini mengalami perubahan signifikan antara tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan pergeseran prioritas dan kebutuhan desa. Pada tahun 2021, alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, diikuti oleh penyelenggaraan desa dan penanggulangan bencana. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan mendapatkan bagian yang lebih kecil, sedangkan pembiayaan memiliki porsi terkecil.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan dengan penurunan anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan desa, sementara alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan

meningkat. Penyesuaian ini mencerminkan fokus yang lebih besar pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas, serta perhatian khusus terhadap pembiayaan, yang meningkat secara signifikan.

Tahun 2023 melihat alokasi yang lebih tinggi untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penanggulangan bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi untuk penyelenggaraan desa dan pembinaan kemasyarakatan menurun, sementara pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan tetap mendapatkan porsi yang signifikan. Perubahan ini menunjukkan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang dinamis dan mendukung prioritas pembangunan serta mitigasi bencana yang lebih baik.

Dana desa di desa kaluppini telah diimplementasikan dalam berbagai proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana ini telah difokuskan pada enam indikator utama: pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan. Dalam hal infrastruktur, dana desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan tani, jembatan, drainase, embung embung, talut penahan tanah serta sarana air bersih. Proyek-proyek ini secara langsung mempengaruhi aksesibilitas masyarakat, mempermudah transportasi barang dan orang, serta membuka peluang ekonomi baru. Misalnya, perbaikan jalan yang menghubungkan desa dengan pasar terdekat telah meningkatkan arus barang dan mempercepat distribusi produk lokal, yang pada gilirannya mendukung kegiatan ekonomi di desa.

2. Tahapan peran dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat

a. Infrastruktur

Adanya Pembangunan infrastruktur merupakan perubahan yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik. Dengan adanya Pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada perekonomian Masyarakat dengan baik juga mengurangi biaya transformasi dan mempercepat distribusi barang. Hal ini membantu para petani untuk mengangkut hasil panen dengan efisien ke pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. apabila pembangunan infrastruktur selalu di benahi oleh pemerintah desa maka masyarakatnya akan merasa kesejahteraan dalam melakukan aktivitasnya seperti dalam Bertani. Karena Masyarakat desa Kaluppini Sebagian besar profesi sebagai petani dan pedagang.

Dalam proses pembangunan infrastruktur desa, peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur dapat memperkuat keterlibatan warga desa dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mempercepat proses pembangunan tetapi juga memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, drainase, sumber air bersih, embung embung, talut penahan tanah dan jembatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sehari-hari mereka.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan Desa Kaluppini, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memanfaatkan dana desa secara efektif. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan tani, drainase, embung embung, pasar desa, serta fasilitas kesehatan seperti posyandu. Pembangunan tersebut mencakup pengecoran jalan sepanjang 354 meter dan pekerjaan drainase sepanjang 332 meter. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas dasar yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas kehidupan sehari-hari.

Tujuan perbaikan jalan tani di berbagai titik untuk mempermudah para petani mengakses hasil pertanian secara merata. Petani lebih mudah dan cepat dalam mengangkut hasil panen ke pasar atau tempat penjualan lainnya. sehingga biaya transportasi menurun dan pendapatan mereka meningkat. Selain itu, perbaikan jalan tani juga meningkatkan akses ke sumber daya penting seperti pupuk, benih, dan teknologi pertanian, yang dapat

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani secara keseluruhan.

Drainase yang dibangun pada beberapa titik menggunakan dana desa sesuai dengan hasil musdus telah terealisasi. Tujuan pembangunan drainase ini ditempatkan pada beberapa lokasi yang sangat urgen seperti genangan air di pinggir jalan umum, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada bahu jalan yang berdampingan dengan potensi pergerakan tanah akibat air yang tidak mengalir. Setelah pembangunan drainase ini sangat dirasakan manfaatnya karena air mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan kerusakan pada area pemukiman warga akibat air.

Sumber air bersih, air bersih menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadi sangat urgen dalam mengalokasikan dana desa untuk perbaikan sumber air bersih. Tujuan perbaikan sumber air bersih adalah untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat perbaikan sumber air bersih ini sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun kebutuhan pertanian dan lainnya.

Embung embung yang dibangun dari dana desa sebagai patokan air pertanian. Tujuan pembangunan embung embung untuk penyediaan bahan baku air para petani baik pada perkebunan maupun pada peternakan. Setelah pembangunan embung embung ini telah beroperasi, para petani tidak kesulitan pada perairan untuk tanaman dan juga ternaknya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Talut penahan tanah yang dibangun dari dana desa dibangun pada Medan tanah miring, tanah retak, pinggir jalan dan tempat tempat tanah rawan. Tujuan pembangunan Talut penahan tanah yaitu mengatasi terjadinya pergeseran tanah. Setelah pembangunan Talut, tanah yang rawan tidak lagi terjadi pergeseran, sehingga aktifitas dan perekonomian masyarakat pastinya sangat lancar dan tidak lagi terhalang pergeseran tanah.

Pembangunan jembatan dari dana desa menjadi penghubung antara dua tempat yang bersebrangan. Tujuan pembangunan jembatan ini untuk memperlancar transportasi baik antar dusun maupun jalan tani. Dengan adanya pembangunan jembatan dapat dirasakan manfaatnya seperti meningkatkan ekonomi para petani dan memperlancar distribusi hasil pertanian.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat berdampak positif pada kesejahteraan dan perekonomian desa. Infrastruktur yang memadai mendukung kegiatan sehari-hari, seperti bertani dan berdagang, yang merupakan profesi utama masyarakat Desa Kaluppini. Dengan adanya jalan tani yang lebih baik, drainase yang efisien, dan akses yang lebih baik terhadap air bersih serta fasilitas kesehatan, masyarakat dapat bekerja lebih produktif dan hidup dengan lebih nyaman. Dengan berkelanjutan melakukan perbaikan dan pembaharuan infrastruktur, pemerintah desa dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan kelompok masyarakat dibantu untuk memperoleh kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di desa Kaluppini, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama pemberdayaan ini adalah menciptakan otonomi lokal yang lebih baik dan memperbaiki akses terhadap sumber daya.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah desa juga sering menghadirkan pendampingan dari yayasan SCF (SULAWESI CIPTA FORUM) sebagai yayasan yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa kaluppini. Adapun fokus usaha di desa kaluppini yaitu pengelolaan gula merah menjadi gula semut. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Melalui berbagai program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, banyak anggota masyarakat yang berhasil mengembangkan usaha mereka atau memulai usaha baru. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan musiman yang sering kali tidak stabil. Dengan adanya dukungan modal dan pelatihan, para pelaku usaha lokal kini dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien dan kompetitif, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan masyarakat yang mampu menyalurkan aspirasi dari masyarakat seperti BPD. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, mereka lebih cenderung memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Partisipasi ini memungkinkan identifikasi kebutuhan dan prioritas lokal secara lebih akurat, sehingga proyek yang dijalankan lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan masukan dari warga sering kali selesai tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan, karena adanya keterlibatan langsung dari mereka yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

Partisipasi masyarakat di desa Kaluppini sudah bagus karena masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa kaluppini. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan desa seperti memberikan sumbangan berupa material, makanan pada saat pembangunan juga masyarakat selalu membawa alat masing masing sesuai keperluan.

Dampak dari partisipasi masyarakat di desa Kaluppini mencerminkan perubahan positif dalam efektivitas program, kohesi sosial, kemampuan lokal, dan akuntabilitas. Partisipasi yang aktif tidak hanya memperbaiki hasil dari berbagai inisiatif desa tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih damai.

d. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial di desa Kaluppini membawa dampak yang baik untuk masyarakat, Salah satu dampak paling signifikan dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah penurunan tingkat kemiskinan, Dengan adanya program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat yang sebelumnya kurang beruntung mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap layanan dasar membantu mengurangi beban ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, program bantuan pangan dan subsidi kesehatan mengurangi beban finansial keluarga miskin,

membantu mereka untuk lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Dari hasil penelitian ada 40 kepala keluarga yang keluar dari kategori miskin setelah mendapatkan bantuan dari program dana desa. Sedangkan dari segi kesehatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar meningkat dengan adanya dana desa serta fasilitas kesehatan juga semakin di lengkapi untuk memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat sehingga angka stunting di desa kaluppini mengalami penurunan dan upaya upaya pencegahan juga rutin dilakukan oleh pihak kesehatan bekerja sama dengan pemerintah desa

e. Ekonomi

Ekonomi masyarakat adalah bidang yang luas dan kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling berhubungan. Memahami dinamika ekonomi masyarakat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan ekonomi secara umum. Desa sering kali didominasi oleh sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduk terlibat dalam kegiatan bertani, berkebun, atau peternakan. Kegiatan ini mungkin melibatkan produksi pangan, seperti beras, jagung, atau sayuran, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga bisa dipasarkan ke luar desa. Selain pertanian, beberapa desa mungkin mengandalkan usaha kecil dan menengah seperti kerajinan tangan, produksi barang lokal.

Dari hasil penelitian, Salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi di desa kaluppini adalah pengembangan UMKM di setiap daerah Indonesia. Ekonomi di desa kaluppini sudah cukup baik terbukti dengan adanya bantuan dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa yaitu pengelolaan gula melah menjadi gula semut, dana ini sering kali dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembangunan fasilitas produksi. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat desa dapat memulai atau memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program-program ini mendorong kewirausahaan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar desa.

f. Pendidikan

Penggunaan dana desa untuk sektor pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Namun, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kaluppini, Bapak Muh. Salata, serta Kaur Keuangan, Ibu Hariani, terungkap bahwa saat ini dana desa di Desa Kaluppini belum dialokasikan untuk pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebutuhan akan perbaikan dan pengembangan fasilitas pendidikan, dana desa belum dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter.

Salah satu tantangan utama pendidikan di desa adalah aksesibilitas. Banyak desa, terutama yang terletak di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai atau jaraknya terlalu jauh bagi anak-anak untuk menempuhnya setiap hari. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah, di mana anak-anak mungkin terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga atau karena kesulitan transportasi.

Kepala desa dan kaur keuangan menyebutkan bahwa saat ini dana desa belum dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan sekolah dan TK. Ini menandakan adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah desa dapat mengidentifikasi area-area di fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan dan merencanakan penggunaan dana desa secara lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, meskipun dana desa telah digunakan untuk berbagai sektor lainnya, alokasi untuk pendidikan di Desa Kaluppini masih minim. Untuk memastikan bahwa sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian yang layak, penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan mengalokasikan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di desa.

3. Strategi Pembangunan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan di Desa Kaluppini dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga untuk menetapkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk enam tahun, diikuti oleh Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Setelah APBDes disahkan, pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, dengan transparansi dan akuntabilitas. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaat bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Desa Kaluppini adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal. Masyarakat aktif terlibat dalam setiap tahap, mulai dari musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Selama pembangunan, warga berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan program pemberdayaan, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam musyawarah desa dengan memberikan saran dan masukan. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat desa mencerminkan keberhasilan partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa Dana desa di Desa Kaluppini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai proyek strategis. Fokus utama penggunaan dana ini meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Infrastruktur yang lebih baik telah memperbaiki aksesibilitas dan transportasi, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para petani dan pedagang. Pemberdayaan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM, pelatihan keterampilan, dan penyediaan modal usaha telah menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program desa telah memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang berdampak positif pada efektivitas program dan kohesi sosial. Program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial dan akses layanan kesehatan yang lebih baik, telah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih ada, dengan upaya peningkatan akses dan kualitas yang terus dilakukan oleh pemerintah desa. Secara keseluruhan, implementasi dana desa di Desa Kaluppini telah memperlihatkan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian yakni:

- a. Peranan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi Masyarakat sangat baik dalam Pembangunan desa dan juga sarana prasana sebagai penunjang dalam pembanguna desa. Dan factor penghambat yaitu sumber daya manusia apabila SDM kurang berkerja sama maka dapat menghambat pekerjaannya selain itu terkadang lambatnya pencair dana desa, kurangnya pemahaman tentang keterampilan manajemen keuangan
- b. ***Dana desa berdampak baik terhadap ekonomi Masyarakat, pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan***

otonominya agar tumbuh dan berkembang juga memberikan perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa oleh karena itu Masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh.

2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

- a. pemerintah desa Kaluppini terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari peranan dana desa ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua Masyarakat desa Kaluppini.
- b. Masyarakat desa Kaluppini di harapkan untuk dapat ikut serta dalam peranan dana desa baik dalam hal Pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower*, 1(1), 97–111 [Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa \(1\).Pdf](#).
- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. (Doctoral dissertation, IAIN parepare) [17.2900.003.pdf \(iainpare.ac.id\)](#).
- Azizah, R. N. (2017). *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. (Doctoral dissertation, UIN Raden) [Skripsi Azizah.pdf \(radenintan.ac.id\)](#).
- Deliarinov. (2016). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Edisi keti). Rajawali Pers.
- Darmawan1, H. I. W. A. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 241–246. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2376/1580>
- Darmawan, Rika Rahma, Erma. (2022). Evaluation Of The Use Of The Siskeudes Application In Efforts To Improve The Quality Of Village Financial Accountability (Case Study In Batu Mila Village District Maiwa Kab. Enrekang), *Journal AK-99*, Jilid 2, hal 132-140 <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/download/1992/1181>
- Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. (Cetakan 1).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Hasoloan. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Penerbit NEM.
- Kambey, A., Rorong, J. geovani, & Senduk, V. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(1), 84–97 [442541-none-eaf9a39f.pdf \(neliti.com\)](#).
- Kasmiati, Arham, & Suhardi, D. (2023). *Analysis Of Village Fund Allocation On Community Empowerment In Enrekang 2018-2022*. 3(November), 296–305 [2660-Article Text-7861-1-10-20231104 \(2\).pdf](#).
- Kementerian Keuangan No 247. (2015). *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- Kemangan RI. (2022). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia : Perdesaan*. 1–98.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1), 5–19 [Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar | B2052151027 | Jurnal Ekonomi Daerah \(JEDA\) \(untan.ac.id\)](#).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanajak. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30*, 2–16.
- Mulatsih, S., Hidayah, U., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya. *Jurnal Benefita*, 5(1), 101–112 [\(PDF\) Optimalisasi Unit](#)

[Usaha Bumdes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran \(researchgate.net\).](#)

- Nugrahaningsih, P., & Winarna, J. (2016). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa Dengan Pengembangan BUMDes Berbasis Sistem Informasi Akuntansi. *In Prosiding SNAMK (Seminar Nasional Akuntansi Manajemen Dan Keuangan)*, 121–128 [Lihat artikel \(google.com\)](#).
- Nuraini, A. (2021). *Peran Dana Desa di Desa Karang untuk Pembangunan Ekonomi Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Ponorogo [210717231 Aprilia Nuraini Ekonomi Syariah.pdf \(iainponorogo.ac.id\)](#).
- Nuraini, Ratmono, & Ali, K. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. *Snppm*, 47–56 [View of Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa \(Add\) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur \(ummetro.ac.id\)](#).
- Panirikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Iain Manado [full skripsi sumria.pdf \(iain-manado.ac.id\)](#).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Permendagri No. 113. (2014). *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 6(1), 1617–1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>
- Permendes RI No 21. (2016). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 1–38.
- Permendes No 6. (2018). *Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*. 1–25.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*.
- Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36 [View Of Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat \(Unsrat.Ac.Id\)](#).
- Saharuddin. (2017). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65 [Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng | GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan \(unhas.ac.id\)](#).
- Schuler, S. R., Hashemi, S. M., & Riley, A. P. (1997). The Influence of Women's Changing Roles and Status in Bangladesh's Fertility Transition: Evidence from a Study of Credit Programs and Contraceptive Use. *World Development*, 25(4), 563–575 [The influence of women's changing roles and status in Bangladesh's fertility transition: Evidence from a study of credit programs and contraceptive use - ScienceDirect](#).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet.1). Alfabeta.
- Tanan, C. I., & Fonataba, B. F. (2022). Pengalokasian Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Warbo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 135–150 [View of Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo \(jkpjurnal.com\)](#).
- Undang Undang RI No. 22. (1999). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. 7(3), 213–221.
- Undang Undang RI No. 23. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 8(33), 44.
- UU Republik Indonesia No. 6. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. 37(3), 243–254.
- Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60 [Template Jurnal](#)

[IJCCS \(kemdikbud.go.id\)](http://IJCCS(kemdikbud.go.id)).

- Fatimah, F., Arfianty, A., Nurwani, N., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 melalui Kegiatan Pengenalan Go-Digital bagi UMKM di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/mallomo/article/view/732>
- Putri, S. (2023). *Kajian Atas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). <http://scholar.unand.ac.id/213668/>
- Risnawati, R., & Dangnga, M. S. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PADA DESA PASANG KABUPATEN ENREKANG. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/a>
- Hatta, M., & Azis, A. (2017). Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Economics Bosowa*, 3(8), 16-32. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/303>

KREDIT MACET PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SANGASANGA PERIODE TAHUN 2015-2018. 18.

- Pestari, A. (2020). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Meda Gatot Subroto.*
- Ramadhan, S., Mahdalena, & Badu, R. S. (2022). Strategi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Kota Timur untuk Mengatasi. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 1, Issue 3).
- Ramandhana, D. Y., Jayawarsa, A. . K., & Aziz, S. (2018). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequa-cy Ratio(CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017. 1, 30–40.*
- Rini, R. S., & Aristanto, E. (2019). *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD di Yogyakarta dan BPD Jawa Timur). 2.*
- Suhendar. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Karang Anyar.*
- Sujai, M., & Mujahidin Tolitoli, S. (2019). Analysis of non Performing Loan Management PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Mitra Usaha Rakyat Tolitoli Sub-Branch Office SINCE RUWAU. In *SEIKO : Journal of Management & Business* (Vol. 3, Issue 1).
- Suryanto. (2020). Analisis Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Usaha Rakyat Indonesia. *AdBispreneur*, 4(2), 113. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488>
- Vhinka, M., Sutrisna, K., Adriani Prayustika, P., & Elfarosa, K. V. (2022). *Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Denpasar Renon.* <https://repository.>

g. _____